

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1980.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Arifin P. Soeria Admadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1988.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* Pusat Studi Hukum FH. UII. Yogyakarta. 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bernard L. Yanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Cekli Setya Pratiwi, et.al., *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988.
- Fadel, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

- Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2002
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- _____, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Josef Riwu Kaho. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Yogyakarta. 1990.
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, UM Jember, Jember, 2014.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2000.
- Kontjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1978.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendiks*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Utomo, Bandung, 2005.
- Lembaga Administrasi Negara RI. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. 1997.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1998.
- Machfud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012.
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2004.
- Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2016.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Paulus Efendie Lotulung, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

- _____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Revrison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*., BPFE, Yogyakarta, 1997.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widia, Jakarta, 2002.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- S.F. Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Satya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia Bandung, 2018.
- Sukamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan II*, Jakarta, 2000.
- Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Victor Situmorang, dkk., *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

25 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 1972.

JURNAL, MAKALAH, OPINI:

A.Hamid S.Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Makalah pidato pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

Arianca Boboy, Saryono Yohanes, Aksi Sinurat, *Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Sibatik Journal, Vol. 1, Issue 1, 2021.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, No. 2 Vol. 23, 2012.

Bayu Dwi Anggono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Vol. 22 No. 2, 2010.

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.

Kejagung Gandeng 16 Ahli Usut Kerugian Perekonomian Negara Surya Darmadi Rp. 78 T, kumparan.com/kumparannews/kejagung-gandeng-16-ahli-usut-kerugian-perekonomian-negara-surya-darmadi-rp-78-t-1yiazRxqXp/full

Kerugian Negara Atas Kasus Surya Darmadi Meningkatkan Jadi Rp. 104,1 Triliun, news.republika.co.id/berita/rhf20w436/kerugian-negara-atas-kasus-surya-darmadi-meningkat-jadi-rp-1041-triliun?

M. Thalib, Syamsir, Iswandi, *Analisis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Limbago, Journal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 1, Tahun 2022.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, September – Desember, 1997.

_____, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Putu Eka Pitriyantini, *Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu*, Jurnal Filsafat Vol. 18 Nomor 1, April 2008.

Sapto Budoyo, *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Civis, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2, 2014.

Sejarah Singkat BPKP, <https://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

Sitti Mawar, *Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum*, Jurnal Justicia, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 1 No. 1, 2020.

Steven Supranto, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Testimonium de Auditu dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 1, 2014.

Tubagus Muhammad Nasarudin, *Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara*, Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 01 Juni 2020.

DISERTASI DAN TESIS:

Diah Yuliasuti, *Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Minola Sebayang, *Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Olivia Sari Theodore, *Optimalisasi Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Robertson, *Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) Untuk Memulihkan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

Wessy Trisna, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

PUTUSAN PENGADILAN DAN MAHKAMAH KONSITUSI:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2021.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 68/Pid.SUs-TPK/2022/PN.Smg, tanggal 30 Januari 2023.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2023.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT.SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4183/K/Pid.Sus/2023, tanggal 13 September 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, tanggal 14 September 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, tanggal 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2016.